

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besarnya harapan kepada pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang baik (good government), mengharuskan pemerintah untuk secara positif melakukan perbaikan-perbaikan di dalam tubuh pemerintahan sendiri. Good government harus dapat dilaksanakan dan dipenuhi agar tercapai kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan yang mendasar berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah (indra bastian, 2007)

Oleh karena itu, untuk mengelola pemerintahan dengan baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya, salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sendiri, serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah itu sendiri. Kewenangan pemerintah dalam mengelola keuangan di dasarkan pada sistem akuntansi pemerintahan yang merupakan suatu rangkaian dari akuntansi pemerintah yang di atur dengan peraturan menteri keuangan di tingkat pemerintah pusat, dan peraturan Gubernur/ Walikota/ Bupati di tingkat pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan mengacu pada suatu standar yaitu standar akuntansi pemerintahan (Mardiasmo, 2004)

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan hal ini di tegaskan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan Nomor 1 paragraf 9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2007)

Suatu pemerintahan yang menerapkan standar akuntansi pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan standar akuntansi pemerintah diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk di pertanggungjawabkan (Abdul Halim, 2007)

Oleh karena itu, dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, pemerintah harus menerapkan dan mempratekkan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan (*Good governance*). (Abdul Hafiz Tanjung, 2008)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas, karena yang

menerapkan standar akuntansi pemerintah adalah sumber daya manusia (Ricard. L, 2003) keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan masalah klasik yang selama ini menghambat perbaikan kualitas pelaporan keuangan. Hal lain yang perlu di perhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun laporan keuangan daerah.

Masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan standar akuntansi pemerintahan yang masih tergolong baru dilingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas.

Menurut peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik: (i) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu, (ii) andal yaitu

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikasi. (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (iv) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian BPK dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini. Untuk kualitas terbaik, maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) artinya auditor yakin, berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan telah bebas dari kesalahan atau kekeliruan yang material. Opini kedua adalah wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) diberikan karena meskipun ada kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan (Mulyadi, 2002).

Opini paling buruk adalah tidak wajar (*adverse opinion*) opini diberikan karena auditor yakin, berdasar bukti-bukti yang dikumpulkannya, bahwa laporan keuangan mengandung banyak sekali kesalahan dan kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar. Tidak memberikan pendapat (*Disclaimer opinion*) terjadi jika auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa

menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah (Mulyadi, 2002)

Kesenjangan antara kenyataan dan harapan terjadi ketika fakta menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hilir tidak baik. penyebab buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir karena adanya perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan penerapan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) Padahal seharusnya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta didukung kompetensi sumber daya manusia yang bagus maka kualitas laporan keuangan akan baik. ketidaksesuaian tersebut menjadi masalah yang penting untuk diteliti sejauh mana penerapan kualitas kompetensi sumber daya manusia serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilingkungan pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati dkk (2014) menemukan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tulus Harefa (2013) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial

Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya Medisin Kholis (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah. Ketidakkonsistenan tersebut dikarenakan perbedaan responden yang digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. dari segi kuantitas, telah ada beberapa satuan kerja yang sudah memiliki beberapa pegawai akuntansi. dan sisi kualitas, sebagian besar pegawai sub-bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang sudah memiliki tugas dan fungsi sub-bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang bersifat terspesifikasi dengan jelas.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati dkk (2014). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi objek penelitiannya. Alasan dipilihnya Kabupaten Rokan Hilir sebagai objek penelitian karena Kabupaten Rokan Hilir ini telah menyelenggarakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akan tetapi menurut laporan hasil pemeriksaan untuk kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2013 menyimpulkan bahwa BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian”, berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, BPK RI telah memeriksa Neraca pemerintah kabupaten Rokan Hilir, Laporan Realisasi

Anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah disiarkan hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2013 yang memuat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun-tahun sebelumnya (*sumber.http//pekanbaru.bpk.go.id/*). Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu didukung untuk bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan agar memperoleh opini baik.

Berdasarkan penjelasan yang uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan terhadap akuntansi keuangan daerah
2. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah dan meningkatkan kualitas SDM dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pada SKPD di kabupaten Rokan Hilir.
3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para akademis yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada perkembangan akuntansi keuangan daerah.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini menjelaskan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia serta kualitas laporan keuangan daerah.

Bab III : Bab ini menjelaskan tentang populasi dan metode pengambilan sampel, identifikasi, dan pengukuran variabel, metode pengumpulan, teknis analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian.

Bab V : Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari analisis Data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

Bab VI : Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

